

PROFIL WAJIB BELAJAR 9 TAHUN DAN ALTERNATIF PENUNTASANNYA

Nurul Ulfatin
Amat Mukhadis
Ali Imron

Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang 5 Malang
E-mail: ulfatien@yahoo.com

Abstract: The Profile of 9-year Compulsory Education and an Alternative to Its Completion. The focus of this study is on describing the 9-years compulsory education profiles at Kediri district and portraying the problems in implementing the program. The data were collected through analyzing the relevant documents, observing, interviewing, and carrying out focused-group discussions involving go respondents. The results of descriptive, qualitative analyses reveal that the profiles of Kediri's 9 year compulsory education reflect the population, development, distribution, quality and efficiency of each district. This suggests the need for an education model as the alternative to deal with the existing problems..

Abstrak: Profil Wajib Belajar 9 Tahun dan Alternatif Penuntasannya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui (1) profil wajib belajar 9 tahun di kabupaten kediri, (2) profil wajib belajar di kecamatan yang memiliki APK terendah dan tertinggi, (3) peta masalah wajib belajar, (4) potensi sumber daya penunjang penuntasan wajib belajar, (5) kebutuhan dan alternatif untuk mengatasi masalah yang timbul dalam pelaksanaan wajib belajar 9 tahun. Data dikumpulkan dengan analisis dokumen, pengamatan, wawancara, dan FGD dari 90 orang informan, dan dianalisis dengan teknik deskriptif dan kualitatif. Hasil penelitian adalah: (1) profil wajib belajar 9 tahun dapat terlihat dari sisi kependudukan, pembangunan pendidikan, data pokok, pemerataan, mutu, efisiensi, dan sebaran APK tiap kecamatan; (2) profil ketidaktuntasan wajib belajar terlihat dari rendahnya APK, jumlah sekolah, siswa, lulusan dan *drop out*; (3) peta masalah ketidaktuntasan bersumber dari rendahnya ekonomi orang tua, geografis-demografis, dan sosial-budaya orang tua, (4) potensi sumber daya yang perlu diperhatikan dalam penuntasan wajib belajar adalah sumber daya alam dan sosial; (5) kebutuhan yang harus dipenuhi dalam penuntasan wajib belajar 9 tahun adalah alternatif model pendidikan yang dikembangkan berdasarkan analisis masalah dan potensi yang ada.

Kata kunci: wajib belajar, *drop out*, lulusan sekolah

Wajib belajar untuk pendidikan dasar (tingkat SD dan SMP) atau dikenal dengan wajib belajar 9 tahun sudah dicanangkan oleh pemerintah beberapa tahun yang lalu. Bahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ayat 2 secara tegas telah mengamanatkan “pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya”. Selanjutnya, pada ayat 3 juga menegaskan “wajib belajar tersebut merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat”. Wajib belajar 9 tahun yang dimaksud juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 pasal 1, yaitu yang menye-

butkan bahwa program pendidikan minimal yang harus diikuti warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan yang dimaksud berbentuk sekolah dasar (SD), madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat, serta sekolah menengah pertama (SMP), dan madrasah tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.

Walaupun wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun sudah dicanangkan dalam kurun waktu yang relatif lama, namun penuntasannya masih belum tercapai. Banyak masalah yang timbul dalam pelaksanaan wajib belajar 9 tahun, terutama di daerah pedesaan dan daerah pegunungan/terpencil. Penyebab ketidaktuntasan wajib

belajar dapat diidentifikasi sesuai dengan kondisi wilayah dan masyarakatnya. Dari sejumlah hasil penelitian ditemukan bahwa penyebab itu antara lain: (1) masyarakat memiliki kondisi ekonomi yang lemah, (2) sosial budaya masyarakat yang kurang mendukung, (3) kurangnya sarana pendidikan, (4) rendahnya kualitas dan dedikasi guru, (5) letak geografis yang sulit dijangkau, (6) keterbatasan informasi, dan (7) persepsi masyarakat yang menganggap kurang pentingnya pendidikan bagi dirinya sendiri. Kenyataan ini diperkuat oleh hasil penelitian pada awal dicanangkannya wajib belajar 6 tahun (Ulfatin, 1995), kemudian diperkuat lagi dengan penelitian berikutnya pada tahun 2003 tentang gambaran awal wajib belajar 9 tahun (Ulfatin, 2003), dan penelitian-penelitian lain yang serupa (Mukhadis dan Kustono 2003; Taruh, 2008). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa wajib belajar di daerah kategori pedesaan dan daerah kategori lain dapat disimpulkan belum tuntas karena berbagai faktor.

Berdasarkan data statistik nasional, wajib belajar 9 tahun di banyak daerah bahkan di pulau Jawa sekalipun belum dapat dikatakan tuntas. Memang di beberapa daerah ada yang sudah tuntas, tetapi jumlahnya sangat kecil dan terbatas di daerah perkotaan saja. Sebagaimana hal ini terjadi di sebagian wilayah Jawa Timur. Di Kediri misalnya, sebagai bagian dari wilayah Jawa Timur yang pemerintahannya terdiri atas kota dan kabupaten terdapat kesenjangan yang mencolok dalam penuntasan wajib belajar 9 tahun. Di daerah kota (pemerintah kota), Kediri dapat dikatakan sudah dapat menuntaskan wajib belajar 9 tahun (Dinas Pendidikan Kota Kediri, 2007). Namun tidak demikian halnya di daerah pedesaan (wilayah pemerintah kabupaten) yang belum terjadi penuntasan wajib belajar 9 tahun (Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, 2008). Dari data yang ada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur (2007), sebagian besar daerah Jawa Timur yang didominasi daerah pedesaan belum menunjukkan penuntasan wajib belajar 9 tahun, termasuk di antaranya Kabupaten Kediri. Hal ini diperkuat oleh *Mile Stones* Pendidikan Propinsi Jawa Timur tahun 2007 yang menunjukkan bahwa di setiap kabupaten di Jawa Timur terdapat kantong penyumbang *drop out* SLP, lulusan SD tidak melanjutkan ke SLP, dan buta huruf terbesar. Hal ini diakui oleh Pemda Kabupaten Kediri pada tahun 2008 dengan melihat indikator kunci (*Key Development Milestones*) dalam pemerataan dan perluasan akses pendidikan yang dihitung dari APK untuk SD mencapai 102,78, APK SMP mencapai 88,11, APM SD mencapai 95,51 dan APM SMP mencapai 69,80.

Di samping masih menunjukkan belum ada penuntasan wajib belajar 9 tahun di kabupaten Kediri,

data tersebut sifatnya masih kasar. Artinya, tidak sampai bisa mengungkap secara mendalam mengapa wajib belajar 9 tahun belum tuntas, dan jika demikian, belum terungkap juga bagaimana pemecahannya yang paling efektif. Hal ini antara lain karena belum pernah dilakukan pemetaan secara menyeluruh dan mendalam yang dapat menghasilkan profil pelaksanaan wajib belajar sampai ke daerah pedesaan. Untuk itu, pelaksanaan wajib belajar 9 tahun pada desa-desa di wilayah kabupaten Kediri perlu dievaluasi dan diteliti ulang.

Pengkajian ulang dan penemuan pemecahan tentang penuntasan wajib belajar 9 tahun secara komprehensif dan mendalam sangat penting dilakukan karena berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, mengingat pertumbuhan penduduk di daerah tersebut sangat pesat. Di samping itu, penemuan model penuntasan wajib belajar 9 tahun sangat ditunggu, karena di banyak daerah lain memiliki karakteristik lingkungan alam dan sosial yang relatif sama. Sebagai gambaran, fenomena yang terjadi di masyarakat pedesaan (khususnya kabupaten Kediri), berdasarkan pengamatan dan diskusi peneliti dengan tokoh masyarakat, praktisi pendidikan, dan ahli pendidikan menunjukkan banyak anak usia remaja (usia SMP) yang tidak bersekolah. Mereka sebagian putus sekolah (*drop out*) dari sekolah lanjutan pertama (SMP atau MTs) dan sebagian tidak melanjutkan setelah lulus sekolah dasar (SD atau MI). Hal ini terjadi karena berbagai faktor antara lain: (1) desakan ekonomi orang tua, yang mengakibatkan anak harus terpaksa menjadi tenaga kerja, (2) bias jender yang terjadi pada pandangan masyarakat desa, yang mengakibatkan banyak anak perempuan tidak melanjutkan sekolah dan menikah usia dini, (3) sarana baik transportasi maupun sarana pendidikan yang tidak dapat menjangkau anak-anak di pedesaan dan kendala geografis, dan (4) mahalnya perlengkapan pendidikan yang harus disediakan oleh orang tua dari keluarga miskin.

Secara umum penuntasan wajib belajar 9 tahun dapat dilalui melalui tiga tahapan manajemen, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi (Hoy dan Miskel, 2005). Perencanaan merupakan kegiatan yang sistematis yang terdiri atas penetapan jenis kegiatan, waktu, pelaksana, prosedur dan mekanisme kerja, kriteria keberhasilan, teknik, dan sarana kegiatan. Dalam melaksanakan tahap perencanaan ini, pemerintah harus memandang pendidikan ke depan dan memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dengan memanfaatkan informasi dan data yang ada, pemerintah dapat menetapkan tindakan konkrit antara lain: (1) merumuskan secara tegas dan jelas tujuan yang

akan dicapai; (2) mengumpulkan data dan informasi yang berhubungan dengan tujuan rencana; (3) menganalisis dan mengklasifikasi data; (4) menjabarkan rencana-rencana secara spesifik dan operasional; (5) membuat pilihan-pilihan alternatif strategi pemecahan; (6) menyesuaikan rencana dengan situasi dan kondisi; (7) menetapkan urutan prioritas dalam merealisasikan setiap rencana; dan (8) menetapkan tindakan spesifik tentang teknik/metode, waktu, kriteria, pelaksana, dan hal-hal lain terkait dengan masalah teknis pelaksanaan kegiatan.

Tahapan berikutnya adalah pelaksanaan. Pada tahapan ini yang terpenting adalah bagaimana pemerintah dapat memerankan diri sebagai pemimpin yang mampu menggerakkan semua unsur atau sumber yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan, baik unsur manusia maupun nonmanusia (Doore, 1981). Unsur manusia itu antara lain kepala dinas pendidikan, pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, dan anggota masyarakat. Sedangkan unsur nonmanusia antara lain sarana, prasarana, dana, dan kebijakan. Keberadaan kedua kelompok unsur ini dalam pelaksanaan satuan organisasi pendidikan (sekolah) saling berhubungan dan berinteraksi, baik dalam merealisasikan tugas pada tingkat teknis yaitu pembelajaran di kelas maupun pada tingkat manajerial kebijakan pendidikan di wilayahnya.

Tahapan akhir dari kegiatan manajemen adalah evaluasi. Pada tahapan ini, pemerintah dapat melakukan pengukuran dan penilaian atas hasil dan pencapaian target yang direncanakan. Penilaian yang kontinyu dan berkelanjutan sangat penting untuk ditekankan, karena selama ini evaluasi seringkali belum dianggap sebagai kesatuan kegiatan yang penting dalam manajemen oleh para praktisi di lapangan.

Tujuan penelitian ini untuk memecahkan masalah wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di kabupaten Kediri, yang dirinci sebagai berikut. Pertama, untuk mengetahui gambaran umum (profil) pelaksanaan wajib belajar 9 tahun, yang meliputi: data pokok wajib belajar, pemerataan wajib belajar, mutu wajib belajar, efisiensi internal wajib belajar, sebaran APK dan APM wajib belajar di setiap kecamatan. Kedua, mengetahui profil wajib belajar 9 tahun di kecamatan Banyakan dan Pare. Ketiga, mengetahui peta masalah wajib belajar 9 tahun, yang meliputi faktor geografis-demografis, ekonomi, sosial-budaya, dan kelembagaan sekolah. Keempat, mengetahui potensi sumber daya penunjang penuntasan wajib belajar 9 tahun, yang meliputi: (1) kegiatan dan jam efektif belajar siswa, serta muatan lokal, (2) partisipasi masyarakat, (3) sumber daya alam dan sumber daya sosial. Kelima, mengetahui kebutuhan dan alternatif untuk mengatasi masalah yang timbul dalam pelaksa-

naan wajib belajar 9 tahun. Keenam, mengembangkan *prototype* model pendidikan dasar untuk penuntasan wajib belajar 9 tahun. Ketujuh, menguji keefektifan model yang disusun; dan mengimplementasikan serta sosialisasi model yang dihasilkan.

METODE

Penelitian ini akan dilakukan selama dua tahun di Kabupaten Kediri. Pada tahun pertama digunakan pendekatan kuantitatif untuk melakukan survei serta pendekatan kualitatif untuk melakukan analisis dokumen, pengamatan, wawancara dan fokus groups discussion (FGD). Penelitian tahun pertama dilakukan untuk menghasilkan profil pelaksanaan wajib belajar 9 tahun, masalah penyebab ketidaktuntasan, dan draf model strategi penuntasannya. Secara keseluruhan, metode yang digunakan dalam penelitian adalah *Research and Development* (R and D) dari Borg dan Gall (1992) dan dikombinasi dengan penelitian tindakan (*action research*). Penentuan lokasi dan latar penelitian dilakukan secara bertahap. Pertama, lokasi penelitian ditentukan di kabupaten Kediri. Pemilihan kabupaten Kediri didasarkan atas pertimbangan substansi bahwa kabupaten Kediri termasuk kabupaten di Jawa Timur yang memiliki potensi kepadatan penduduk tinggi, namun wajib belajar 9 tahunnya secara statistik belum tuntas. Kedua, penentuan latar penelitian, dipilih dua kecamatan di wilayah kabupaten Kediri yang dinilai paling rendah dan paling tinggi penuntasannya yaitu kecamatan Banyakan dan kecamatan Pare.

Populasi penelitian ini adalah seluruh pihak atau stakeholders yang terlibat dan berkepentingan dengan pendidikan dasar atau wajib belajar 9 tahun yang bertempat tinggal di kabupaten Kediri. Sampel penelitian diambil secara *purposive*, yaitu dipilih sesuai dengan tujuan penelitian (Moleong, 2008). Untuk mendapatkan informasi yang sesuai, dipilih informan kunci sebagai subjek yang representatif untuk dijadikan sampel penelitian. Informan kunci dipilih berdasarkan jenis masalah dan kebutuhan data, antara lain Kepala Dinas Pendidikan, Kasubag Penyusunan Program dan Pendataan, kepala sekolah, pengawas sekolah, tokoh masyarakat, dan orang tua.

Sumber data dalam penelitian tahun pertama ini adalah informan kunci, FGD yang dilaksanakan dalam rangka penelitian ini, dan dokumen/arsip terkait dengan wajib belajar 9 tahun. Sesuai rekomendasi Borg dan Gall (1992) serta Moleong (2008), teknik pengumpulan data dilakukan dengan bertahap. Pertama, dilakukan analisis dokumen. Dokumen yang dianalisis adalah data statistik tentang wajib belajar 9 tahun yang ada di Kantor Dinas Pendidikan kabu-

paten Kediri. Kedua, untuk melengkapi dan mengkonfirmasi keakuratan data statistik, dilakukan wawancara kepada sejumlah informan terkait. dilakukan wawancara. Ketiga, dilakukan *Focus Groups Discussion* (FGD) dan observasi. FGD dilakukan dengan para perwakilan kepala sekolah, pengawas sekolah, kepala/ sekretaris desa, anggota komite, dan orang tua di kecamatan Banyakan dan kecamatan Pare. Sedangkan observasi dilakukan dengan melihat secara langsung letak geografis, potensi daerah, dan keadaan sekolah di dua wilayah penelitian.

Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan data lain sebagai pembandingan (Moleong, 2008). Triangulasi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah triangulasi teknik/metode, sumber, dan penyidik. Di samping itu, pengecekan keabsahan data juga dilakukan dengan diskusi sejawat. Diskusi sejawat dilakukan dalam bentuk diskusi oleh anggota tim peneliti, dan seminar kolegial yang melibatkan peneliti lain dalam bidang yang sama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Pendidikan Kabupaten Kediri

Pemerintah daerah kabupaten Kediri terdiri atas 24 kecamatan, 344 desa/kelurahan (termasuk 57 atau 16,57% desa tertinggal). Jumlah penduduk adalah 1.531.187 orang. Dari jumlah tersebut, terdapat 146.921 orang berusia 7-12 tahun (9,60%), 73.769 orang berusia 13-15 tahun (4,82%), dan 76.679 orang berusia 16-18 tahun (5,01%). Pertumbuhan penduduk dalam dua tahun terakhir (2007-2008) meningkat rata-rata 1,25% per tahun dengan angka kelahiran 9,85% dan angka kematian 0,27%. Angka migrasi keluar diperkirakan 6,06% per tahun dan migrasi ke dalam 1,02% per tahun.

Tingkat pendidikan penduduk digambarkan sebagai berikut. Tidak/belum pernah sekolah sebanyak 195.385 orang (12,76%). Tidak/belum tamat SD sebanyak 351.828 orang (23,29%). Tamat SD sebanyak 386.860 orang (35,27%). Tamat SMP sebanyak 137.576 orang (8,98%). Tamat SMA sebanyak 53.940 orang (3,52%). Tamat SMK sebanyak 42.575 orang (2,78%). Tamat Diploma I dan II sebanyak 2.088 orang (0,14%). Tamat Diploma III /Sarjana Muda sebanyak 4.176 orang (0,27%). Tamat Sarjana 11.600 orang (0,76%). Dan tidak jelas/tidak terjawab sebanyak 340.404 orang.

Angkatan kerja digambarkan sebagai berikut. Penduduk yang berkerja sebanyak 729.517 orang (47,64%). Penduduk yang mencari kerja sebanyak 107.752 orang (7,04%). Dan penduduk yang bukan angkatan kerja sebanyak 693.918 orang yaitu yang terdiri atas penduduk bersekolah sebanyak 281.702

orang (18,40%), penduduk mengurus rumah tangga sebanyak 149.010 orang (9,73%), dan penduduk tidak jelas pekerjaannya 263.206 orang (17,19%).

Isu dan permasalahan pokok yang menjadi prioritas perhatian Pemerintah Kabupaten Kediri di bidang pendidikan saat ini (2009-2010) adalah. (1) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM), (2) Pendidikan Untuk Semua (PUS), (3) kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan, (4) pendidikan sebagai investasi jangka panjang dan biaya pendidikan, (5) disparitas (kesenjangan) pendidikan antara kota dan kabupaten, (6) kurikulum tingkat satuan pendidikan, (7) sumberdaya pendidikan, dan (8) pengelolaan pendidikan.

Profil Wajib Belajar 9 Tahun di Kabupaten Kediri

Berdasarkan data tahun 2008, data pokok Wajib Belajar 9 tahun dilihat dari jumlah sekolah, jumlah siswa, jumlah lulusan, kelas, ruang, dan fasilitas. Data tersebut sebagaimana tertera pada Tabel 1.

Berdasarkan Tabel 1 sebagian besar data pada wajib belajar 4 tahun jauh lebih banyak dari data pada wajib belajar 6 tahun. Sebagai contoh yang penting untuk dikemukakan terkait dengan siswa adalah: (1) jumlah SD dan MI yaitu 873 jauh lebih banyak dari jumlah SMP dan MTs yaitu 189, (2) jumlah siswa SD dan MI yaitu 150.966 jauh lebih banyak dari jumlah siswa SMP dan MTs yaitu 62.053, (3) jumlah lulusan SD dan MI yaitu 23.750 jauh lebih banyak dari jumlah lulusan SMP dan MTs yaitu 13.381.

Pemerataan wajib belajar 9 tahun dapat dilihat dari indikator APK, APM, Rasio (siswa/sekolah, siswa/kelas, siswa/guru, kelas/ruang, kelas/guru), tingkat pelayanan sekolah, dan kepadatan penduduk. Data pemerataan wajib belajar 9 tahun sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.

Berdasarkan Tabel 2 sebagian besar data komponen indikator untuk wajib belajar 6 tahun jauh lebih banyak dari data pada wajib belajar 9 tahun, kecuali rasio siswa dalam kelas yang pada SD dan MI lebih kecil dari rasio siswa dalam kelas pada SMP dan MTs, yaitu 24 dibanding 38. APK dan APM yang dalam rencana strategis pembangunan pendidikan sebagai indikator utama untuk mengukur ketuntasan wajib belajar ditunjukkan bahwa APK SD dan MI jauh lebih banyak capaiannya dari APK SMP dan MTs, yaitu 102,78 dibanding 88,11, begitu juga APM SD dan MI sejumlah 96,51 jauh lebih banyak dari APM SMP dan MTs sejumlah 69,80. APK ini dihitung dari jumlah siswa yang bersekolah (SD/MI atau SMP/MTs) dibagi usia anak 7-12 tahun atau 13-15 tahun dikali 100%. Sedangkan APM dihitung

dari jumlah siswa pada usia 7-12 tahun atau 13-15 tahun dibagi jumlah penduduk usia itu dikali 100%.

Mutu wajib belajar 9 tahun dilihat dari angka mengulang, angka putus sekolah, dan angka lulusan, kelayakan guru, kondisi ruang kelas, fasilitas sekolah, dan partisipasi stakeholders. Data tersebut sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.

Berdasarkan Tabel 3, angka mengulang rata-rata siswa SD dan MI lebih banyak dari angka mengulang rata-rata siswa SMP dan MTs, yaitu 0,72% dibanding 0,15%. Namun, angka putus sekolah siswa SD dan MI jauh lebih kecil dari siswa SMP dan MTs, yaitu 0,55% dibanding 1,00%. Sedangkan lulusan antara SD/MI dan SMP/MTs, persentasenya hampir berimbang yaitu 96,40% dan 97,81%. Kelayakan guru yang kategori baik (layak) untuk SD dan MI lebih rendah dari SMP dan MTs, yaitu 72,13% dibanding 84,72%. Kondisi ruang kelas yang kategori baik (layak), pada SD dan MI jauh lebih rendah dari ruang kelas SMP dan MTs, yaitu 49,61%

dibanding 88,23%. Untuk fasilitas sekolah terutama perpustakaan, pada MTs jauh lebih rendah dari SMP maupun SD dan MI, yaitu 27,17% dibanding yaitu 81,44% dan 79,51%. Begitu juga fasilitas UKS pada MTs jauh lebih rendah dari SMP maupun SD dan MI, yaitu 17,39% dibanding 58,76% dan 79,74%. Begitu juga untuk fasilitas laboratorium, di MTs jauh lebih rendah dari SMP, yaitu 19,87% dibanding 49,48%. Untuk partisipasi dari pemerintah pusat, pada SD dan MI lebih tinggi dari SMP dan MTs, yaitu 75,00% dibanding 37,02%. Sementara partisipasi dari pemerintah daerah pada SD dan MI lebih rendah dari SMP dan MTs, yaitu 2,00 dibanding 36,35%.

Efisiensi Internal Wajib Belajar 9 Tahun, digunakan indikator jumlah keluaran, jumlah tahun-siswa, putus sekolah, mengulang, lama belajar, tahun-siswa terbuang, tahun masukan per input, dan rasio keluaran-masukan. Data efisiensi internal sebagaimana tertera pada tabel 4.

Tabel 1. Data Pokok Wajib Belajar Tahun 2008

No	Komponen	Wajar 6 tahun			Wajar 9 tahun		
		SD	MI	Jumlah	SMP	MTs	Jumlah
1.	Sekolah	654	219	873	97	92	189
2.	Siswa Baru Tk.I	21.421	4.131	25.553	16.384	6.185	22.569
3.	Siswa	125.573	25.393	150.966	44.022	18.031	62.053
4.	Lulusan	20.127	3.631	23.750	12.877	4.504	17.381
5.	Ruang Kelas						
	a. Baik	2.284	670	2.954	1.053	423	1.476
	b. Rusak Ringan	1.736	448	2.184	96	45	141
	c. Rusak Berat	913	148	1.061	48	10	58
6.	Kelas	4.976	1.306	6.282	1.114	519	1.633
7.	Guru						
	a. Layak mengajar	6.014	1.235	7.249	2.697	1.536	4.233
	b. Semi layak	230	517	747	251	200	451
	c. Tidak layak Fasilitas	1.097	229	1.326	179	141	320
8.	a. Perpustakaan	610	144	754	79	25	104
	b. Lapangan olahraga	397	59	456	13	48	61
	c. UKS	610	149	755	57	16	73
	d. Laboratorium	-	-	-	48	10	58

Tabel 2. Indikator Pemerataan Wajib Belajar 9 Tahun

No	Indikator	SD+MI	SMP+MTs
1.	APK	102,78	88,11
	a. Laki-laki	103,46	82,15
	b. Perempuan	102,01	86,17
2.	APM	96,51	69,80
3.	Rasio		
	a. Siswa/sekolah	173	328
	b. Siswa/kelas	24	38
	c. Siswa/guru	16	12
	d. Kelas/ruang	1,01	0,97
	e. Kelas/guru	0,67	1,00
4.	Tingkat pelayanan sekolah	140	87
5.	Kepadatan penduduk	105 km ²	56 km ²

Tabel 3 Mutu Wajib Belajar 9 Tahun

No	Indikator	Wajar 6 Tahun (%)			Wajar 9 Tahun (%)		
		SD	MI	Rata-rata	SMP	MTs	Rata-rata
1.	Mengulang	0,64	0,79	0,72	0,16	0,14	0,15
2.	Putus sekolah	0,39	0,72	0,55	1,19	0,78	1,00
3.	Lulusan	99,37	93,43	96,4	98,86	96,76	97,81
4.	Kelayakan guru						
	a. layak	81,92	62,34	72,13	87,62	81,83	84,72
	b. semi layak	3,13	26,10	14,6	8,03	10,66	9,34
	c. tidak layak	14,94	11,56	13,25	5,72	7,51	6,61
5.	Kondisi ruang kelas						
	a. baik	46,30	52,92	49,61	87,97	88,49	88,23
	b. rusak ringan	35,19	35,39	35,29	8,02	9,41	8,71
	c. rusak berat	18,51	11,69	15,1	4,01	2,09	3,05
6.	Fasilitas sekolah						
	a. perpustakaan	93,27	65,75	79,51	81,44	27,17	54,30
	b. lapangan OR	60,70	26,94	43,82	13,40	52,17	32,78
	c. UKS	93,27	66,21	79,74	58,76	17,39	38,07
	d. Laboratoruim	-	-	-	49,48	10,87	30,17
7.	Partisipasi						
	a. pemerintah pusat	75,00	75,00	75,00	13,24	60,81	37,02
	b. orang tua	20,00	20,00	20,00	11,30	21,62	16,46
	c. pemda	2,00	2,00	2,00	70,36	2,34	36,35

Tabel 4. Efisiensi Internal Wajib Belajar 9 Tahun

No	Komponen	Efisiensi Internal	
		SD+MI	SMP+MTs
1.	Jumlah keluaran	973	968
2.	Jumlah tahun-siswa	5.956	2.972
3.	Jumlah putus sekolah	27	32
4.	Jumlah mengulang	40	45
5.	Lama belajar		
	a. lulusan	6,04	3,00
	b. putus sekolah	2,91	2,00
	c. kohort	5,96	2,97
6.	Tahun siswa terbuang		
	a. jumlah	172	72
	b. mengulang	95	7
	c. putus sekolah	77	64
7.	Tahun masukan/lulusan	6,12	3,07
8.	Rasio keluaran/masukan	0,98	0,98
9.	Angka bertahan	98,61	98,93
10.	Koefisien efisiensi	97,91	97,87

Berdasarkan Tabel 4, dapat dilihat efisiensi suatu sekolah terutama dari rata-rata lama belajar sampai lulus, yaitu untuk wajib belajar 6 tahun, masa belajar seharusnya adalah selama 6 tahun, sedangkan untuk wajib belajar 9 tahun, masa belajar seharusnya adalah selama 3 tahun. Berdasarkan rata-rata lama belajar itu, kondisi terbaik ada pada tingkat SMP dan MTs, yaitu 3 tahun. Bila dilihat dari lama belajar sampai putus sekolah, kondisi terburuk adalah tingkat SD dan MI, yaitu sebesar 2,91 artinya walaupun telah lama (beberapa tahun) bersekolah akhirnya mengalami putus sekolah (drop out). Di samping itu, efisiensi juga bisa dilihat dari tahun-siswa terbuang karena mengulang, putus sekolah

atau gabungan mengulang dan putus sekolah. Bila dilihat dari sisi ini, kondisi di SMP dan MTs memiliki nilai lebih tinggi dari kondisi di SD dan MI. Berdasarkan analisis ini dapat disimpulkan bahwa efisiensi pada tingkat SMP dan MTs memiliki kinerja yang lebih baik dari efisiensi di SD dan MI.

Sebaran APK dan APM Wajib Belajar 9 Tahun

Sebaran APK dan APM yang menjadi indikator utama untuk mengukur ketuntasan belajar pada setiap kecamatan dapat dilihat pada Tabel 5.

Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui bahwa APK Wajib Belajar 6 tahun adalah 102,78 (sudah lebih dari 100). Ini berarti wajib belajar untuk tingkat SD dapat dikatakan telah tuntas. Sementara, untuk APK wajib belajar 9 tahun baru mencapai 88,11. Dengan merujuk batas ketuntasan yang ditargetkan oleh pemerintah (APK minimal 95,50), maka untuk mencapainya masih kurang 7,39. Hal ini berarti dapat dikatakan bahwa wajib belajar 9 tahun di kabupaten Kediri belum tuntas. Jika dihitung dari data prediktif tentang jumlah penduduk pada usia SMP yang dikalikan dengan kekurangan (7,39), maka jumlah anak yang tidak bersekolah diperkirakan mencapai 5000 anak.

Jika mencermati APK tiap kecamatan, maka APK SMP terendah ada di wilayah kecamatan Banyakan, yaitu hanya mencapai 40,63. Capaian APK SMP ini dapat dikatakan berlawanan dengan APK SD yang mencapai 103,07. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa wajib belajar 9 tahun (SMP) di kecamatan Banyakan jauh dari (belum) tuntas. Oleh karena itu, faktor-faktor yang menjadi penyebab keti-

daktuntasan wajib belajar 9 tahun di kecamatan Banyak perlu diketahui lebih lanjut. Sebaliknya, juga ditunjukkan bahwa APK yang tergolong tinggi untuk tingkat SMP terdapat pada kecamatan Grogol dan Pare yang mencapai 103,63 dan 100,58. Angka

ini jauh di atas dari APK rata-rata SMP yang ada di kecamatan-kecamatan lain, bahkan jauh lebih tinggi dari APK minimal penuntasan yang dipersyaratkan (95,50).

Tabel 5. Keragaman APK dan APM Wajib Belajar 9 Tahun Tiap Kecamatan di Kabupaten Kediri Tahun 2008

No	Kecamatan	Wajar 6 tahun		Wajar 9 tahun	
		APK	APM	APK	APM
1	Banyakan	103,07	103,07	40,63	30,61
2	Gampengrejo	100,20	100,20	95,37	74,70
3	Grogol	106,26	106,26	103,63	81,40
4	Gurah	103,52	103,52	97,99	80,15
5	Kandangan	102,71	102,71	83,01	63,63
6	Kandat	105,02	105,02	95,50	67,86
7	Kepung	105,38	105,38	95,60	68,74
8	Kras	102,14	102,14	87,60	76,56
9	Kunjang	104,19	104,19	88,92	70,62
10	Mojo	104,39	104,13	87,21	63,47
11	Ngadiluwih	104,83	104,83	83,79	73,28
12	Ngancar	109,44	109,44	80,81	56,54
13	Pagu	97,94	97,94	88,81	75,41
14	Papar	102,75	102,75	76,68	65,82
15	Pare	100,86	100,86	100,58	79,72
16	Plemahan	104,43	104,43	87,06	67,49
17	Plosoklaten	95,20	95,20	81,84	70,02
18	Puncu	103,10	103,10	75,77	63,95
19	Purwoasri	106,75	106,75	85,98	66,82
20	Ringinrejo	105,51	105,51	69,87	36,41
21	Semen	103,79	103,79	79,86	63,77
22	Tarokan	100,40	100,40	88,56	67,91
23	Wates	99,15	99,15	84,47	71,62
24	Kayen Kidul	98,33	98,33	80,92	70,58
	Rata-Rata	102,78	96,51	88,11	69,80

Tabel 6. Faktor Penghambat Wajib Belajar 9 Tahun di Kecamatan Banyak

No	Faktor Penghambat	Jenis Hambatan	Skor Penilaian	Kualifikasi
1	Geografis-Demografis	Jarak/transportasi ke sekolah	9,0	Sangat bermasalah
		Kondisi alam (pegunungan)	9,0	Sangat bermasalah
		Sebaran penduduk	2,0	Kurang bermasalah
		Daerah terpencil	1,0	Tidak bermasalah
		Bencana alam	0	Tidak bermasalah
2	Ekonomi	Penghasilan orang tua rendah	15,0	Sangat bermasalah
		Anak membantu orang tua	7,0	Sangat bermasalah
		Biaya sekolah mahal	16,0	Sangat bermasalah
3	Sosial - Budaya	Sekolah dianggap tdk bermanfaat	0	Tidak bermasalah
		Pendidikan orang tua rendah	5,0	Sangat bermasalah
		Anak perempuan tdk perlu sekolah	0	Tidak bermasalah
		Motivasi belajar rendah	6,0	Sangat bermasalah
		Budaya membaca kurang	2,0	Kurang bermasalah
		Dukungan orang tua rendah	7,0	Sangat bermasalah
		IQ anak dibawah standar	2,0	Kurang bermasalah
4	Kelembagaan sekolah	Peraturan ketat	1,0	Tidak bermasalah
		Kurangnya komunikasi dengan orang tua/penyuluhan	4,0	Sangat bermasalah
		Guru PNS kurang	1,0	Tidak bermasalah
		SMP di daerah kurang	4,0	Sangat bermasalah
		Gedung sekolah memprihatinkan	1,0	Tidak bermasalah

Berdasarkan hasil temuan statistik di atas, maka penyelidikan dan analisis lebih lanjut difokuskan pada kasus wajib belajar 9 tahun di dua kecamatan, yaitu kecamatan Banyakan dan kecamatan Pare. Kecamatan Banyakan menjadi perhatian karena pertimbangan APK capaiannya terendah dan letak geografisnya yang mewakili daerah pedesaan/pegunungan dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Dengan demikian, fokus penelitian di kecamatan Banyakan ditekankan pada penemuan faktor-faktor yang menjadi penyebab ketidaktuntasan wajib belajar 9 tahun beserta upaya-upaya yang bisa ditempuh untuk mengatasinya. Sedangkan kecamatan Pare menjadi perhatian karena pertimbangan APK yang dicapai tergolong tinggi dan letak geografisnya yang mewakili daerah perkotaan dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Dengan demikian, fokus penelitian di kecamatan Pare ditekankan pada penemuan model penuntasan wajib belajar yang mungkin memiliki nilai transfabilitas tinggi untuk dapat diterapkan di daerah lain.

Peta Masalah dan Alternatif Pemecahan Wajib Belajar 9 tahun

Berdasarkan hasil pengamatan, wawancara dan *focus groups discussion* (FGD), penyebab ketidaktuntasan wajib belajar 9 tahun di kecamatan Banyakan kabupaten Kediri dapat dipetakan dilihat dari faktor (1) geografis-demografis, (2) ekonomi, (3) sosial-budaya, dan (4) kelembagaan sekolah.

Berdasarkan Tabel 6, faktor penghambat yang tergolong kualifikasi sangat bermasalah secara berurutan adalah: (1) faktor ekonomi, yaitu biaya sekolah yang dianggap mahal, pendapatan orang tua yang rendah, dan anak banyak membantu pekerjaan orang tua; (2) faktor geografis, yaitu jarak dari rumah ke sekolah yang sangat jauh dan biaya transportasi mahal, daerah pegunungan yang luas dan tidak bisa dijangkau dengan transportasi sepeda *onthell*/berjalan kaki; (3) faktor sosial-budaya, yaitu dukungan orang tua yang rendah, motivasi belajar anak rendah dan pendidikan orang tua yang rendah; dan (4) faktor kelembagaan, yaitu jumlah sekolah (SMP) yang kurang memadai dan kurangnya komunikasi/penyuluhan dari sekolah/pemerintah kecamatan dan desa kepada orang tua yang kurang.

Ada banyak alternatif yang bisa ditawarkan untuk mengatasi penuntasan wajib belajar 9 tahun. Di antaranya adalah (1) mendirikan sekolah (SMP) berasrama, (2) mendirikan (menambah) SMP baru, (3) perluasan SD-SMP satu atap, dan (4) mengaktifkan Kejar Paket B. Untuk memilih dan merancang model pendidikan yang dapat menuntaskan wajib belajar 9 tahun tersebut perlu dianalisis lebih lanjut

sumber masalah dan potensi yang ada di daerah setempat.

Berdasarkan hasil analisis data, diketahui bahwa masalah penuntasan wajib belajar 9 tahun yang ada di Kecamatan Banyakan bersumber dari faktor geografi-demografi, ekonomi, sosial budaya, dan kelembagaan sekolah. Sementara, untuk mencari pemecahan masalah harus memperhatikan faktor-faktor potensial yang dapat mendukung atau menunjang pemecahan masalah. Faktor yang paling potensial itu adalah (1) kebiasaan anak membantu orang tua bekerja (di hutan) di luar jam sekolah, (2) pengembangan muatan lokal budidaya dan penghijauan hutan, (3) partisipasi orang tua dalam bentuk sumbangan membeli alat peraga dan dukungan terhadap kegiatan ekstra kurikuler, (4) sumber daya alam dalam bentuk pengembangan di bidang agribisnis mangga, jagung, dan padi, (5) sumber daya sosial dalam bentuk keterampilan bertani, kegiatan pengajian, berdagang, dan kegiatan kerja bakti (gotong royong).

Jika dilakukan analisis lebih dalam, maka dapat dikatakan bahwa persoalan penuntasan wajib belajar 9 Tahun di kecamatan Banyakan sangatlah rumit. Dari segi geografis, jarak rumah tempat tinggal anak ke sekolah (SMP) yang sudah ada (ada tiga MTs dan satu SMP) sangat jauh sehingga membutuhkan dukungan transportasi. Sementara itu, sarana transportasi dari rumah menuju ke sekolah belum tersedia. Menurut pengakuan orang tua, jika anak harus bersekolah ke MTs/SMP yang sudah ada, ia harus mengeluarkan biaya transportasi Rp 5.000,- setiap hari untuk naik ojek. Jika dipecahkan dengan cara penyediaan transportasi sepeda motor, maka tidak memungkinkan karena mahal dan anak usia SMP belum berhak mendapatkan surat ijin mengemudi. Jika dipecahkan dengan penyediaan sepeda pancal juga tidak memungkinkan, karena kondisi alam pegunungan dengan medan yang berat tidak dapat ditempuh dengan sepeda pancal. Jika dipecahkan dengan penyediaan angkudes, tidak efisien karena jarak rumah antar anak secara geografis juga terpencar-pencar. Jika harus dijalani dengan jalan kaki, maka kondisi anak juga berada dalam keadaan kepayahan, apalagi budaya setempat jarang anak sekolah yang makan pagi (sarapan) terlebih dahulu. Kondisi ini masih juga diperparah oleh motivasi bersekolah bagi anak dalam kategori rendah.

Jika alternatif lain yang dipilih adalah mendirikan SMP baru, hal ini sangat berat karena di kecamatan tersebut baru satu tahun berdiri SMP baru. Namun tambahan satu SMP itu jika dibandingkan dengan jumlah anak yang diprediksi lulus SD, maka tetap belum memadai. Jika didirikan SMP baru di tempat lain, yang menjadi persoalan adalah terlalu

sedikitnya jumlah peserta didik di wilayah tersebut, dan sekaligus terpecahnya asal daerah siswa. Pendirian SMP baru membutuhkan biaya yang relatif banyak sementara jumlah siswa yang dilayani relatif sedikit. Hal ini dapat dikatakan tidak efisien. Di samping itu, pendirian sekolah baru harus dibarengi dengan pengangkatan guru baru, karena belum tersedia guru berkualifikasi bidang studi untuk menjadi guru SMP. Pendirian sekolah baru perlu perencanaan yang komprehensif dan persiapan yang panjang karena harus melibatkan banyak pihak terutama terkait dengan pendanaan. Pendanaan SMP baru yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah tidak mungkin dilakukan dalam waktu dekat karena harus mendapat persetujuan dan pendanaan dari pemerintah pusat.

Jika alternatif yang dipilih adalah mengaktifkan Kejar Paket B, maka hal ini tidak efektif karena anak yang dilayani adalah anak usia remaja (SMP) sementara Kejar Paket B yang ada hanya diikuti oleh orang dewasa. Di samping itu, waktu luang anak relatif masih banyak karena ketika anak tidak bersekolah kegiatannya banyak “membantu” orang tua bekerja. Menurut pengakuan orang tua, mereka mengajak anaknya bekerja karena alasan daripada menganggur. Di samping itu, materi pokok/program pada Paket B tidak cocok untuk anak yang baru lulus SD karena program Paket B lebih berorientasi pada materi praktis fungsional.

Berdasarkan analisis sejumlah alternatif di atas belum tampak alternatif yang paling cocok untuk penuntasan wajib belajar di kecamatan Banyakan. Namun masih ada alternatif terakhir yang belum dianalisis, yaitu mengintegrasikan SD-SMP satu atap. Alternatif ini ditawarkan untuk dipilih karena dari beberapa segi sangat dimungkinkan. Dari segi efektivitas, dapat dikatakan efektif karena kurikulum yang digunakan sama dengan kurikulum SMP pada umumnya. Dari segi pengelolaan, dapat dikatakan efisien karena menyatu dengan pengelolaan SD, namun perlu perluasan mandat dari segi tugas dan pelayanan. Dari segi ketenagaan, sangat memungkinkan karena sebagian guru yang ada di SD sudah berkualifikasi sarjana. Dari segi biaya, dapat dikatakan paling efisien karena tidak perlu menambah/mendirikan gedung baru. Namun, untuk menjadikan alternatif terpilih ini menjadi model yang akan dikembangkan, maka perlu pula disertakan potensi daerah yang mungkin dikembangkan secara terpadu dengan program sekolah. Potensi ini antara lain: kekayaan alam agribisnis “mangga”, kebiasaan anak membantu orang tua, partisipasi orang tua, dan sumber daya sosial dalam bentuk keterampilan bertani, kegiatan pengajian, berdagang, dan kegiatan kerja bakti (gotong royong).

Meta Alternatif Terpilih

Berdasarkan atas keseluruhan kajian tentang alternatif penuntasan wajib belajar 9 tahun beserta faktor limitasinya, maka dikedepankan meta alternatif penuntasan sebagai berikut. Pertama, perluasan mandat SD untuk membuka layanan pendidikan tingkat SMP. Kedua, SD yang mendapatkan mandate membuka layanan pendidikan SMP, berada dalam satu atap dan memberikan layanan pendidikan pada sore hari. Ketiga, SD yang mendapatkan mandate membuka layanan pendidikan SMP, dipilih dari SD yang kualifikasi akademik gurunya lebih tinggi dan jumlah lulusannya terbanyak tidak melanjutkan ke SMP dibandingkan dengan SD lain di Kecamatan Banyakan. Keempat, SD dipilih yang posisi geografisnya paling mudah dijangkau dari seluruh desa yang ada di Kecamatan Banyakan. Kelima, SD yang memberikan layanan pendidikan jenjang SMP, disebut SD-SMP satu atap (baik dari segi tempat maupun dari segi pengelolaannya). Keenam, siswa yang rumahnya sangat jauh dari sekolah, alternatifnya diberikan layanan khusus dalam pendidikan bentuk lain. Ketujuh, orang tua yang biasa mempekerjakan anaknya, diberikan prioritas memperoleh Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau bantuan khusus untuk orang miskin. Kedelapan, terdapat mentor dari guru SMP terdekat untuk menjadi guru dan supervisor kunjung ke SD perluasan mandat. Kesembilan, penyediaan honorarium tambahan bagi kepala dan guru SD perluasan mandat sebagai pengelola dan guru di SMP pada sore hari.

SIMPULAN

Bertolak dari temuan penelitian dan pembahasan, hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut. Profil wajib belajar 9 tahun di kabupaten Kediri secara umum dapat dilihat dari sisi gambaran kependudukan (terutama usia sekolah), pembangunan pendidikan, data pokok (jumlah sekolah, siswa, lulusan, guru, kondisi ruang/gedung), pemerataan (APK dan APM, rasio, dan tingkat pelayanan), mutu (angka mengulang, putus sekolah, dan lulusan), efisiensi (jumlah keluaran dan lama belajar), dan sebaran APK di tiap kecamatan. Profil penuntasan wajib belajar dilihat dari sisi pemerataan dengan indikator utama capaian APK, yaitu terendah (belum tuntas) di kecamatan Banyakan dan tertinggi (sudah tuntas) di kecamatan Pare.

Peta masalah ketidaktuntasan wajib belajar 9 tahun (di kecamatan Banyakan) dapat disimpulkan karena faktor: ekonomi orang tua yang rendah, geografis-demografis yang berada di daerah pegunungan dengan transportasi yang sulit, sosial-budaya orang tua dengan pendidikan yang sangat rendah, dan ke-

lembagaan sekolah dengan sedikitnya jumlah sekolah (SMP) tidak sebanding dengan keperluan jumlah siswa. Sebaliknya, ketuntasan wajib belajar 9 tahun dapat disimpulkan karena banyaknya sekolah yang ada termasuk banyaknya sekolah unggulan, lingkungan yang sangat mendukung, banyak lembaga kursus di sekitar sekolah, dan partisipasi dari pemerintah daerah dan orang tua yang sangat tinggi.

Potensi sumber daya yang perlu diperhatikan dalam penuntasan wajib belajar 9 tahun, antara lain: kegiatan dan jam efektif belajar siswa, muatan lokal, partisipasi masyarakat, dan sumber daya alam dan sosial. Kebutuhan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan wajib belajar 9 tahun adalah tersedianya

sekolah jenjang SMP di tempat SD yang sudah ada dengan ciri: dilaksanakan sore hari, gurunya dari guru SD yang berkualifikasi sarjana, dipilih SD yang geografisnya mudah dijangkau, lulusannya banyak yang tidak melanjutkan, merekomendasikan BKSM, dan pendampingan guru oleh mentor dari guru SMP terdekat.

Prototype model pendidikan dasar untuk penuntasan wajib belajar 9 tahun yang dipilih adalah perluasan mandat terhadap SD yang sudah ada dengan menambah tugas untuk mengelola dan melaksanakan pendidikan SMP berupa Pendidikan Dasar Terintegrasi Berkelanjutan berbasis Kewirausahaan (PD TBK).

DAFTAR RUJUKAN

- Centers for Disease Control and Prevention. 2000. *Guidelines for School and Community Programs to Promote Lifelong Physical Activity among Young People*. (Online), (<http://www.cdc.gov>), diakses 12 Maret 2003).
- Depdiknas. 2003. *Konsep Pendidikan Kecakapan Hidup*. Jakarta: Depdiknas.
- Disman, R. K. 1990. *Determinants of Participation in Physical Activity in Exercise, Fitness, and Health*. Champaign, IL: Human Kinetics.
- Dunkin, M., & Biddle, B. 1974. *The Study of Teaching*. New York: Holt, Rinehart & Winston.
- Ennis, C. D. dan Hooper, L. M. 1988. "Development of An Instrument for Assessing Educational Value Orientations". *Journal of Curriculum Studies*. 20 (3). 277-280.
- Ennis, C.D., & Chen, A. 1993. Domain Specifications and Content Representativeness of the Revised Value Orientation Inventory. *Research Quarterly for Exercise and Sport*, 64: 436-446.
- Fraenkel, J. R. dan Wallen, N. E. 1993. *How to Design and Evaluate Research in Education*. New York: McGraw-Hill Inc.
- Hasan, S.H. 2001. *Pendekatan Multikultural untuk Penyempurnaan Kurikulum Nasional*. (Online), (<http://www.puskur.or.id>), diakses 12 Maret 2003).
- Jewett, A.E. 1994. Curriculum Theory and Research in Sport Pedagogy. *Sport Science Review. Sport Pedagogy*. 3 (1):11-18.
- Jewett, A.E., Bain, L., & Ennis, C.D. 1995. *Curriculum Process in Physical Education*. Dubuque, IA: WMC Brown.
- Lutan, R. 2002. *Supervisi Pendidikan Jasmani: Konsep dan Praktek*. Jakarta: Ditjen Dikdasmen.
- Lutan, Rusli 2001, *Asas-Asas Pendidikan Jasmani: Pendekatan Pendidikan Gerak di Sekolah Dasar*. Jakarta: Ditjen Dikdasmen.
- Pate, R. R. & Trost, S. G. 1998. How to Create a Physically Active Future for American Kids. *American College of Sport Medicine, Health & Fitness*. 2 (6): hal: 18-23.
- Ratliffe, T. and Ratliffe, L.M.. 1994. *Teaching Children Fitness: Becoming A Master Teacher*, Human Kinetics.
- Rink, J. E. 1993. *Teaching Physical Education for Learning*. Toronto: Mosby.
- Siedentop, D. 1990. *Introduction to Physical Education, Fitness, and Sport*. California: Mayfield Publishing Company.
- Steinhard, M. A. 1992. *Physical Education, Handbook of Research on Curriculum*. Texas: MacMillan Publishing Company.
- Stran, B. & Ruder, S. 1996. Increasing Physical Activity through Fitness Integration. *Journal of Physical Education, Recreation, and Dance*. 67 (3). hal 41-46.
- Suherman, A. 2007. Realisasi Kurikulum Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar di Kota Bandung, *Makalah*, disajikan dalam acara seminar Peningkatan Mutu Pembelajaran Pendidikan Jasmani Nasional, di Gedung Auditorium FPMIPA JIKA UPI, 30 Oktober.